



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Mei 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL
SUB UNIT KERJA : BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RUBIYO
2. Jabatan : KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
3. NHK : 64670

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	8.325.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 324 m2/200 m2 di KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000		
2. Tanah Seluas 551 m2 di KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 21 m2/21 m2 di KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/110 m2 di KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 1.878 m2/220 m2 di SUBANG, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	174.000.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
2. MOTOR, HONDA CBR SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000		
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	21.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.102.748.126
F. HARTA LAINNYA	Rp.	20.000.000



Sub Total	Rp.	9.642.748.126
III. HUTANG	Rp.	3.450.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.192.748.126

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **27 September 2018**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.